

## Fungsi Humas Pemerintah Terkait Isu Kerentanan Vaksin Covid 19 pada Lansia di Indonesia

David Pamungkas<sup>\*1</sup>, Winda Dwi Astuti Zebua<sup>2</sup>

*Public Relations, Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta*

**Abstract:** The issue of the vulnerability of the Covid-19 vaccine in the elderly is ultimately what causes many people to be reluctant to get the Covid-19 vaccine. This condition is one of the factors that can hinder the preventive efforts made by the Indonesian government to prevent transmission of the Covid-19 virus. This article aims to describe how the government public relations function of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in overcoming public concerns about the side effects of vaccines on the elderly. This article uses a qualitative method with a literature study approach, which is a study used to collect data and information needed with the help of various kinds of reading materials, both online journals, books, and documentation of communication efforts carried out by the public relations of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia (Ministry of Health). RI). Furthermore, the data will be analyzed by making summaries and data reduction, then categorizing, and making conclusions. The findings from this article are that there are two functions of the Ministry of Health's public relations in handling the issue of the Covid 19 vaccine insecurity for the elderly, namely a constructive function and a corrective function. From these two functions, public relations for the Ministry of Health of the Republic of Indonesia needs to carry out persuasive and appropriate communication for the effectiveness of the corrective function, because in this case the issues that cause people's concern are widespread.

### Article History:

Received: 16-01-2024

Accepted: 23-01-2024

### Keywords:

Covid-19, Issues,  
Government Public  
Relations, Vaccine.

## Pendahuluan

Keberhasilan pengembangan vaksin COVID-19 memberikan harapan baru untuk memberantas COVID-19, namun di sisi lain dapat mengganggu stabilitas masyarakat seiring perubahan kebijakan untuk mencapai tujuan cakupan vaksin dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi populasi. mengetahui pedoman yang berlaku. dan kerentanan terhadap informasi yang salah di masyarakat.

Vaksin adalah produk biologi yang mengandung antigen berupa mikroorganisme atau bagian darinya, atau koin yang dibuat darinya, yang telah diperlakukan demikian tertentu bahwa ketika diberikan kepada seseorang menyebabkan kekebalan khusus untuk penyakit tertentu.

Vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin mendorong pembentukan pertahanan tubuh sendiri menghindari kemungkinan infeksi atau penyakit serius. Selama tidak obat pamungkas untuk COVID-19, kemudian vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dan perilaku 3M (penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga Jarak) adalah tindakan perlindungan yang bisa kita gunakan untuk menghindari penyakit COVID-19.

Tujuan vaksinasi tidak hanya untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan tidak hanya untuk menghentikan epidemi, tetapi juga dalam jangka panjang menghapus atau bahkan menghancurkan (menghapuskan/menghilangkan) penyakit itu sendiri. Indonesia

memiliki sejarah panjang dalam upaya pengendalian penyakit dengan vaksinasi atau imunisasi.

Indonesia pun turut serta dalam pencegahan penyakit di bumi dengan vaksinasi. Misalnya, sejak diperkenalkannya vaksin cacar yang pertama Pada tahun 1956 cacar akhirnya dapat diberantas yaitu dimusnahkan di seluruh dunia pada tahun 1974, menyebabkan pengenalan vaksinasi. Campak dihentikan pada tahun 1980. Sama dengan polio setelah vaksinasi Polio pertama kali dideklarasikan pada tahun 1972 dan kemudian menyebar di Indonesia tahun 2014.

Contoh lainnya adalah Indonesia yang sedang gencar melakukan vaksinasi tetanus Toksoid pada ibu hamil, Indonesia akhirnya mencapai status eliminasi tetanus untuk ibu dan bayi baru lahir pada tahun 2016. Tujuan vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan khusus terhadap penyakit Jadi jika suatu saat Anda terkena penyakit itu, Anda tidak akan terkena sakit atau hanya sedikit sakit. Tentu saja, jika seseorang tidak setelah vaksinasi, ia tidak memiliki kekebalan khusus terhadap penyakit tersebut yang dapat dicegah dengan vaksinasi.

Jika kepadatan inokulum tinggi dan merata di seluruh area, itu akan membentuk resistensi penduduk. Kekebalan kelompok, atau kekebalan kawanan, adalah situasi di mana beberapa orang atau kebanyakan orang terlindungi/kebal terhadap penyakit tertentu dan mereka bekerja secara tidak langsung akan terlindungi, yaitu. Mereka juga dilindungi untuk kelompok orang yang rentan yang tidak dikenakan vaksinasi. Status ini hanya dapat dicapai dengan cakupan vaksinasi yang tinggi sama kekebalan kawanan ini menyebabkan perlindungan silang sehingga anak tetap sehat meskipun tidak divaksinasi karena anak-anak lain di lingkungan itu sudah mendapatkannya. Anak-anak yang tidak divaksinasi mendapatkannya keuntungan yang diperoleh dari herd immunity.

Anak-anak yang tidak divaksinasi dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya yang kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga risiko tertular penyakit dari orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kecil. Itu menunjukkan Vaksinasi yang tercakup dengan baik dan merata sangat penting.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi setidaknya enam kelompok prioritas untuk vaksin virus corona. Mereka adalah tenaga kesehatan, tokoh agama, pendidik, pejabat pemerintah, peserta BPJS dan orang dengan rentang antara 18 sampai 59 tahun. Namun, tidak satu pun dari enam kelompok tersebut termasuk dalam kategori lansia. Juru bicara vaksinasi Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tidak masuknya lansia dalam daftar prioritas karena minimnya informasi tentang keamanan vaksin pada lansia.

"Kelompok lansia tidak pada prioritas pertama tapi akan tetap menjadi penerima vaksin setelah ada data lanjut keamanan vaksin pada lansia, baik pada vaksin Sinovac maupun vaksin lainnya," kata Nadia kepada Kompas.com, Sabtu (16/1/2021). Dikutip dari kompas.com, Ms (60), lansia asal Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur meninggal dunia tiga hari usai mendapat vaksin pada Kamis (13/1/2022). Ia divaksin pada Senin (10/1/2022). Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, dr Lilik Lailiyah menjelaskan, masih menginvestigasi penyebab kematian lansia tersebut. Menurutnya, Ms memang memiliki riwayat hipertensi atau penyakit darah tinggi. Namun saat proses screening sebelum vaksin, petugas memastikan Ms dalam kondisi baik.

Meski kasusnya miring, angka kematian covid-19 semakin meningkat di Indonesia. Hasil otopsi rumah sakit menunjukkan bahwa sebagian besar yang meninggal adalah lansia dengan penyakit penyerta sebagai berikut.

Informasi dari Kementerian Kesehatan menunjukkan, jumlah kematian akibat covid-19 di Indonesia naik menjadi 401 pada Selasa (8/3). Ini adalah angka tertinggi sejak 8 September dan selama gelombang variabel Omicron.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, di beberapa rumah sakit, kematian pasien covid-19 didominasi oleh pasien dengan penyakit lain, lanjut usia atau lanjut usia dan pasien yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap.

"Tidak semuanya pasien meninggal karena covid-19, tetapi ada juga yang meninggal dengan covid-19," katanya, Senin (7/3), dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. "Hasil audit kematian di rumah sakit menunjukkan, mayoritas kasus meninggal tersebut adalah lansia dengan komorbid berupa diabetes, hipertensi, dan gagal ginjal," ungkap dia. Mengacu data kumulatif dari 21 Januari hingga 6 Maret 2022, 70% dari 8.239 pasien covid-19 meninggal di rumah sakit belum divaksinasi lengkap, 56% di antaranya lansia, dan 51% memiliki komorbid. "Kelompok rentan bergejala berat hingga berisiko kematian akibat terinfeksi covid-19 yaitu orang-orang dengan komorbid dan juga lansia," ujar juru bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Selasa (8/3), dilansir dari akun Facebook Kementerian Kesehatan.

Melihat aktivitas masyarakat di media sosial media, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin COVID-19 salah satunya ialah kelompok lansia. Karena itu peneliti merasa tertarik untuk melihat bagaimana persepsi kelompok Lansia terhadap kesediaan menerima vaksin COVID-19 ditinjau dengan Health Belief Model. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah keluarga sebagai pendamping lansia dan petugas vaksinator puskesmas. Etika penelitian menggunakan deklarasi Helsinki dan analisis menggunakan analisis tematik dengan konsep Health Belief Model. Pada penelitian ini didapatkan hasil; Lansia memiliki persepsi kerentanan yang baik, Lansia tahu kefatalan virus COVID-19 dapat menyebabkan kematian, Lansia mengerti manfaat dari vaksin COVID-19, agar tidak terjadi placebo effect yakni dimana seseorang akan memiliki efek yakin dari kepercayaannya bahwa obat itu berbahaya dan dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan sehingga membuatnya sakit. akan tetapi lansia masih ragu dengan efek samping dari vaksin tersebut berdasarkan pengalaman orang terdekat yang mereka lihat. Sehingga sangat dibutuhkan peran tenaga kesehatan yang lebih massif dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada lansia untuk dapat mempengaruhi perilaku penerimaan mereka terhadap program vaksin COVID-19.

Hasil Penelitian Sri Martini, Ira Kusumawaty, Yunike Yunike juga menghasilkan delapan tema berkenaan dengan vaksin covid-19 yaitu tidak percaya dengan covid-19; vaksin covid-19 tidak ada gunanya; vaksin melindungi dari covid-19; makin banyak yang meninggal setelah divaksin; takut terhadap metode memasukan vaksin melalui suntikan; Dukungan keluarga dan teman-teman; mencari berita tentang vaksin; ada penyakit bawaan. Persepsi lansia terhadap vaksin dipengaruhi oleh informasi yang diterima dari media dan lingkungan ini mempengaruhi penerimaan terhadap program vaksin.

Pada akhirnya, sedikit atau banyaknya korban yang meninggal akibat vaksin covid-19, tidak sepenuhnya diakibatkan oleh kandungan vaksin itu sendiri, karena vaksin dibuat dengan maksud meningkatkan kekebalan tubuh. Adapun korban meninggal yang mengaku menjadi sakit setelah menerima vaksin covid-19 adalah orang-orang dengan bawaan penyakit lain atau komorbid. Sehingga ketika menerima vaksin, besar kemungkinan orang tersebut menjadi letih dan lesu. Disamping itu. Terpaparnya mereka oleh media massa juga mempengaruhi cara mereka berpikir mengenai vaksin covid-19, dengan ke raguan akan

kandungan vaksin covid-19. Maka tubuh akan secara tidak sadar melakukan penolakan terhadap zat tersebut, dan vaksin tidak terserap oleh tubuh dengan sempurna.

## **Kajian Pustaka**

### ***Isu***

Menurut Harrison (2008:550) dalam (Kriyantono, 2012) memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan, biasanya di dalam arena publik, jika berlanjut, dapat secara signifikan memengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Bias dikatakan bahwa isu adalah gerbang dimana sebuah masalah akan hadir bila tidak segera ditangani dengan baik.

Isu sendiri adalah perbedaan pendapat yang masih menjadi perdebatan banyak orang. Baik berupa kebijakan pemerintah seperti vaksin covid-19, atau masalah fakta seperti banyaknya korban meninggal setelah menerima vaksin yang disebabkan oleh komorbid atau komplikasi penyakit.

Berdasarkan teori di atas maka isu meliputi, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai-nilai yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seperti,

- a) Ketidakpuasan kelompok.
- b) Terjadinya peristiwa tertentu.
- c) Perubahan sosial.
- d) Pengelolaan yang tidak optimal.

Dari semua ini, isu adalah masalah yang mengarah pada masalah yang perlu ditangani dalam perusahaan, organisasi, atau pemerintahan.

Di instansi atau perusahaan hampir selalu ada bagian kehumasan atau bagian kehumasan, termasuk kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Berkiblat pada putusan menteri komunikasi dan informatika nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 mengenai kode etik humas pemerintahan yang menyatakan bahwa humas pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi atau pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

### ***Public Relations***

Menurut IPR (Institute Public Relation) dalam (Frank Jefkins, 1996:8), public relation adalah praktek humas yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan (terus-menerus) dalam rangka menciptakan dan mempertahankan niat baik (goodwill), serta sikap-sikap yang saling pengertian yang bersifat timbal balik (Mutual Understanding) antara suatu organisasi atau perusahaan dengan segenap khalayaknya.

Dengan demikian public relations dapat dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan dengan sebuah rencana yang matang serta berjalan secara terus menerus atau berlanjut di kemudian hari. Sebagai rangka membuat ataupun meningkatkan citra dan image sebuah instansi atau perusahaan dengan cara memberikan sikap yang baik dan rasa saling memahami supaya tercipta hubungan yang symbiosis mutualisme (hubungan saling menguntungkan).

### ***Fungsi Public Relations***

Organisasi berkewajiban untuk selalu memperhatikan aspek komunikasi setiap kali mereka menjalankan semua kegiatan mereka. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya komunikasi merupakan alat utama terjadinya pertukaran informasi sehingga komunikasi bagi para praktisi Public Relations merupakan gerbang utama yang dapat mereka gunakan agar dapat memperoleh relasi dengan khalayak yang memiliki hubungan dengan instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Jika praktisi Public Relations berhasil menjalin hubungan ataupun relasi yang baik dengan khalayak mereka, maka hal ini akan menjadi kelebihan bagi perusahaan karena mereka kedepannya akan mudah untuk menyampaikan informasi kepada khalayaknya. Sebaliknya, jika relasi yang baik tidak terjalin maka hal ini bias menjadi titik lemah sebuah perusahaan atau instansi karena apa yang mereka sampaikan bias saja menimbulkan kesalahpahaman.

Seperti yang diuraikan oleh Djanaid (1993) bahwa public relations memiliki dua fungsi Public Relations, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif (Dayanti et al., 2015)

#### ***1) Fungsi Konstruktif***

Djanalis menganalogikan fungsi ini sebagai "perata jalan". Jadi, humas merupakan "garda" terdepan yang di belakangnya terdiri atas "rombongan" tujuan-tujuan perusahaan. Ada tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia, dan sebagainya. Peranan humas dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi/lembaga, menyiapkan "mental" organisasi/lembaga untuk memahami kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik ataupun organisasi untuk direkomendasikan kepada manajemen, serta menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik organisasi/lembaga yang diwakilinya. Fungsi konstruktif ini mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana dan berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Yang termasuk di sini adalah humas bertindak secara preventif (mencegah).

#### ***2) Fungsi Korektif***

Apabila fungsi konstruktif diibaratkan sebagai "perata jalan" fungsi korektif ini berperan sebagai "peradam kebakaran" (Djanalis, 1993). Apabila api sudah telanjur menjalar dan membakar organisasi/lembaga, peranan yang dapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi/lembaga terjadi masalah-masalah (krisis) dengan publik, humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut.

Pepatah mengatakan, "Mencegah lebih baik daripada mengobati" Anehnya, humas di Indonesia sering kali dipanggil pada saat terjadi krisis. Sementara itu pada saat situasi "aman-aman" saja, humas dibuat menganggur atau disfungsi. Lebih aneh lagi, sering kali humas disalahkan apabila dalam penanganan krisis menunjukkan tanda-tanda kegagalan.

Inilah yang sejak lama menjadi unek-unek para praktisi humas. Ibaratnya, dia hanya mendapat "kotoran kuda" yang diminta mengendalikan kuda, tetapi tidak pernah diajak merawat kuda yang sedang berontak jauh sebelumnya.

Menurut Cutlip dan Center, fungsi public relations adalah:

- a) Menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi).

- b) Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publik sebagai khalayak sasaran.
- c) Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.  
Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan sasaran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat Bersama.

### **Government Public Relations**

Pengertian Government Public Relations Menurut Suprawoto (2018) yakni bahwa Humas pemerintah atau government public relations merupakan penggabungan dari dua suku kata yaitu hubungan masyarakat (humas) dan pemerintah. Akan tetapi tidak berarti bahwa batasan dari pengertian government public relations hanya terbatas pada penggabungan dua kata tersebut saja.

Suprawoto (2018) juga menyampaikan bahwa humas pemerintah atau government public relations, menurut tindakan yang ditunjukkan kepada menghasilkan pendapat dan iklim yang akan mendukung sebuah instansi. Sedangkan Ardianto (2013) bahwa tugas praktisi public relations pada instansi pemerintah harus mampu menjalin relasi yang baik ke dalam (internal) maupun keluar (eksternal) instansi dengan tugas utama yakni melayani informasi kebijakan publik dan pelayanan.

Berdasarkan hal di atas, Government Public Relations dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat atau khalayak mereka bias mengetahui apa yang tengah dilakukan oleh sebuah instansi pemerintahan dan mendorong khalayaknya untuk turut berpartisipasi dalam program pembangunan yang mereka buat.

### **Metode**

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan bantuan berbagai macam bahan bacaan baik jurnal online, buku, dan dokumentasi dari upaya komunikasi yang dilakukan oleh public relations Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).

### **Hasil dan Pembahasan**

Seperti yang diuraikan oleh Djanaid (1993) bahwa public relations memiliki dua fungsi Public Relations, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif (Dayanti et al., 2015). Yang akan dijelaskan sebagai berikut:



**Gambar. 1** Himbuan vaksin untuk semua kalangan  
Source: Instagram kemenkes\_ri

### ***Fungsi Konstruktif***

Dalam pembahasan sebelumnya mengenai isu dan krisis yang terjadi terhadap kemenkes dengan pola komunikasi yang digunakan saat covid-19 ialah terjadinya kegagalan pemahaman oleh beberapa kelompok masyarakat di Indonesia salah satunya seperti lansia, orang-orang dengan komorbid atau penyakit bawaan, penyintas covid hingga ibu menyusui. Dalam komunikasinya, kementerian kesehatan Indonesia seharusnya mampu menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga isu dan kegagalan pemahaman yang berlebih tidak terjadi di beberapa kelompok yang ada. Yang pertama ialah disebabkan oleh lambatnya mengkomunikasikan pembuatan serta penentuan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga lambatnya penyampaian komunikasi ini mengakibatkan beberapa kelompok tidak menerima sumber informasi dari pihak yang kredibel.

Yang kedua sikap masyarakat terhadap penyampaian informasi menjadi simpang Siur karena dibarengi oleh ramainya media sosial yang turut memberitakan mengenai covid, bahayanya vaksin dan sebagainya. Sehingga beberapa kelompok memilih untuk tidak mengikuti vaksin disebabkan oleh lambatnya penentuan kebijakan serta pengkomunikasian kebijakan vaksin kepada masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori diatas, sebagaimana yang disampaikan oleh (Djanalis, 1993) bahwasanya dalam fungsi konstruktif, humas pemerintahan harus bias menjadi perata jalan, dimana merekalah orang-orang yang akan selalu memberikan kemudahan untuk sebuah instansi ketika ingin menyampaikan suatu kebijakan yang baru. Dengan contoh diatas, maka kemenkes dapat dikatakan tidak bekerja dengan optimal dengan bukti tidak siapnya mereka dalam mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan lembaga mereka.

### ***Fungsi Korektif***

Hadirnya Pandemi covid memang menjadi hal yang tidak dapat di duga-duga dan hal ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya kemenkes untuk dapat mengambil tindakan yang tepat agar mampu mencegah dan menangani penyebaran covid, baik dengan cara mengkomunikasikan hingga membuat kebijakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh kemenkes antara lain adalah membuat akun pada kanal social media seperti Facebook untuk menjadi gerbang mereka dalam menyampaikan komunikasi kepada masyarakat.

Berdasarkan fungsi public relations yang disampaikan oleh (Djanalis, 1993) pada fungsi korektif atau kemampuan humas dalam menangani krisis, maka kemenkes sebagai garda terdepan dalam upaya mengkomunikasikan dan pencegahan covid menjadi sumber yang kredibel dengan informasi yang tepat. Apa yang mereka sampaikan pada social media perlahan mampu meyakinkan kelompok orang-orang yang awalnya menolak vaksin sebagaimana seperti data yang diberikan di atas pada kanal Facebook kemenkes dengan peningkatan jumlah orang-orang yang sudah menerima vaksin. Kemenkes juga berempati dan transparan kepada publik sehingga publik dapat merasakan kepedulian jika komunikator mereka menunjukkan empati, komitmen, ketulusan, serta dedikasi yang tinggi. Dalam kasus ini diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dengan kemenkes agar mereka mau menerima vaksin covid. Dengan apa yang kemenkes tunjukkan kepada masyarakat, kemenkes mampu meraih hati dan kepercayaan masyarakat dan hal ini dapat dicapai oleh kemenkes dengan menjalankan komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan dibuktikan dengan pembuatan akun social media seperti Facebook. Pertukaran komunikasi

antara komunikator dan komunikan secara langsung mampu membangun hubungan satu sama lain yang semakin kuat.

### Simpulan

Terjadinya isu kerentanan vaksin covid-19 terhadap lansia pada akhirnya menjadi hal yang harus mampu dihadapi oleh instansi yang berwenang. Karena pada dasarnya setiap instansi pasti memiliki seorang praktisi Public Relations yang memiliki kewajiban membina komunikasi yang harmoning baik dengan khalayak internal atau eksternal. Sehingga adanya isu-isu negative yang bertentangan dengan program isntansi dapat segera diatasi.

### Referensi

- Ardianto, E. (2013). *Handbook Of Public Relations*. Simbiosis Rekatama Media.
- Dayanti, L. D., Kusumawati, F., & Puspo, R. (2015). *Hubungan Masyarakat*. Universitas Terbuka.
- Jefkins, F. (2018). *Public relations for management success*. Routledge.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Perkembangan Covid 19 di Indonesia. [https://m.facebook.com/photo.php?fbid=533300091494211&set=a.418682499622638&type=3&mibextid=cr9u03&\\_rdr](https://m.facebook.com/photo.php?fbid=533300091494211&set=a.418682499622638&type=3&mibextid=cr9u03&_rdr)
- Kriyantono, R. (2012). *The Situational Theory of the Publics in an Ethnography Research: Identifying Abstract Public Response to Crisis Managemen*. *International Journal of Business and Social Sciences*, 3(20), 124–132. [www.ijbssnet.com](http://www.ijbssnet.com)
- Martini, S., Kusumawaty, I., Yunike, Detiana, & Nurung, J. (2021). Why not wearing mask during Covid-19 outbreak: Big question mark. *Gaceta Sanitaria*, 35(2), S546-S548. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.10.094>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. PT remaja rosdakarya.
- Suprawoto. (2018). *Government Public Relations*. Kencana Pramedia Grup.
- Zebua, W. D. A., Rahman, A., Utari, S. A., & Robbani, A. I. (2022). Persuasive Communication in the Covid 19 Campaign for Children. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 97. <https://doi.org/10.24912/jk.v14i1.12513>